



SEJARAH PENANGGULANGAN PROSTITUSI DI WILAYAH HINDIA BELANDA OLEH PEMERINTAH HINDIA BELANDA TAHUN 1870 – 1920

Lucia Arter Lintang Gritantin

Universitas Khairun

E-mail: luciagritantin@gmail.com

Article History:

Received: 10-11-2022

Revised: 25-11-2022

Accepted: 07-12-2022

Keywords:

Prostitusi, Penyakit
Kelamin, Militer,
Hindia Belanda

Abstract: Pemerintah Hindia Belanda tidak dapat lepas dari beberapa dampak terkait prostitusi, terutama pada tahun 1870 - 1920. Hal ini disebabkan karena adanya kerugian yang disebabkan oleh wabah penyakit kelamin di kalangan militer Hindia Belanda. Dampak – dampak yang disebabkan oleh prostitusi salah satunya adalah penurunan performa kerja para anggota militer Hindia Belanda. Beberapa arsip yang ditemukan memberikan informasi mengenai keberadaan para pekerja seks komersil pada tahun 1870 – 1920 yang terjangkit penyakit kelamin membuat pemerintah Hindia Belanda perlu menanggulangi Prostitusi Penting untuk mengetahui mengenai dampak yang ditimbulkan dari prostitusi yang memberi pengaruh besar terhadap dunia Militer Hindia Belanda tahun 1870 – 1920, sehingga kita dapat mengetahui bagaimana sejarah penanganan prostitusi oleh Hindia Belanda di tahun 1870-1920. Serta perlakuan pemerintah terhadap para pekerja seks komersil pada tahun 1870 – 1920.

© 2022 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

PENDAHULUAN

Maraknya wabah penyakit kelamin yang menyerang anggota militer Hindia Belanda pada tahun 1870 – 1920, membuat pemerintah Hindia Belanda menempuh berbagai usaha untuk memberantas wabah tersebut. Usaha pemerintah Hindia Belanda dalam memberantas penyakit kelamin yang mewabah di kalangan anggota militer, salah satunya melalui jalur kebijakan. Kebijakan pemerintah dikeluarkan sebagai usaha untuk pemberantasan penyakit kelamin dapat dilihat dari adanya UU, serta surat para Residen hingga surat himbuan oleh beberapa Komandan kesatuan kepada Gubernur Jenderal di Batavia.

Munculnya banyak himbuan dan dorongan tersebut membuat pemerintah harus mengeluarkan dan membuat UU yang bersifat darurat untuk menangani masalah wabah penyakit kelamin. Salah satu langkah yang diambil pemerintah Hindia Belanda dalam UU pemberantasan penyakit kelamin adalah UU terkait penanggulangan prostitusi. Pemerintah menganggap prostitusi sebagai penyebab besar atas masivnya perkembangan wabah penyakit kelamin.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang ‘Usaha Pemerintah Hindia Belanda dalam Menanggulangi Prostitusi Tahun 1870 – 1920’ menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Penulis melakukan kajian data kualitatif mengenai jumlah prostitusi antara tahun 1870 – 1920 di wilayah Hindia Belanda lalu mendeskripsikannya dengan dilengkapi arsip – arsip terkait kebijakan prostitusi tahun 1870 – 1920, sehingga bisa menjadi penelitian yang layak untuk ditulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah kolonial dalam memberantas penyakit kelamin dikalangan anggota militer adalah dengan menanggulangi penyebaran prostitusi terlebih. Baik prostitusi legal maupun terselubung. Dunia prostitusi dianggap sebagai tempat yang subur dan menjanjikan secara ekonomi bagi PSK dan tempat hiburan bagi para anggota militer yang ingin menyalurkan kebutuhan biologis. Di Indonesia sendiri, pelacuran secara terorganisir dalam rumah–rumah bordil mulai muncul pada masa Kolonial Belanda³. Dalam wilayah Jawa sendiri ada tiga besar daerah yang menjadi pusat prostitusi besar dalam ukuran jumlah pelacur yang cukup banyak, yaitu; Batavia, Semarang dan Surabaya.

Maraknya pelacuran pada abad ke-19 dan banyaknya laporan yang datang dari berbagai daerah di Jawa dan di luar Pulau Jawa terkait masalah jumlah rumah–rumah bordil, pelacuran terselubung dan jumlah korban wabah penyakit kelamin dari anggota militer, kepada Gubernur Jenderal di Batavia. Hal ini membuat Gubernur Jenderal perlu untuk melakukan tindakan intensif lebih lanjut. Untuk menanggapi laporan dan menanggulangi masalah penyebaran penyakit kelamin di kalangan militer.

Bentuk tanggapan terhadap laporan yang masuk kepada Gubernur Jenderal makan pemerintah perlu melakukan tindakan – tindakan seperti dalam mengawasi rumah–rumah bordil dituangkan dalam kebijakan yang dibuat pemerintah Kolonial berikutnya, pada kebijakan tersebut terdapat 23 pasal yang berisi : Peraturan mengenai pemberantasan prostitusi sesuai dengan Besluit Gubernur Jenderal 21 Januari 1874 Mencakup 23 pasal untuk menanggulangi masalah prostitusi, antara lain adalah :

1. Para mucikari dan rumah–rumah Bordil diawasi oleh polisi.
2. Polisi punya wewenang untuk melakukan penyelidikan.
3. Para mucikari memiliki kewajiban untuk menyerahkan pajak kepada polisi
4. Para mucikari wajib melaporkan dirinya dan ada tiap daerah wajib menuliskan nomor–nomor mucikari yang telah didaftar kepada kepala pemerintah setempat.

Pada peraturan Gubernur Jenderal 21 Januari 1874 pasal 1 – 4, terlihat bahwa pemerintah kolonial memberlakukan kebijakan dengan sangat jelas dan tegas dalam usahanya menangani masalah rumah–rumah bordil dan para mucikari sebagai agen para PSK. Munculnya tugas baru bagi anggota polisi sebagai pengawas rumah–rumah bordil serta adanya kewajiban para mucikari untuk melaporkan diri dan menyerahkan pajak kepada polisi setempat, membuat para mucikari tidak lagi bebas dalam menjalankan usahanya. Namun pada kenyataannya pengoperasian rumah bordil sendiri, terdapat rumah bordil yang tidak terawasi dan beroperasi secara gelap. Sehingga walaupun kebijakan telah dikeluarkan, namun tetap ada rumah bordil yang beroperasi secara legal dan illegal 5.

Sedangkan pada pasal berikutnya nomor 5 hingga pasal ke 7 yang berisi sebagai berikut ;

1. Semua kepala Polisi, Kep. Kampong, Kep. Lingkungan wajib memberikan petunjuk kepada wanita yang melakukan pelacuran
2. Jika ada wanita yang melakukan pelacuran maka harus menulis di daftar
3. Jika bukan pelacur dan Kepala Lingkungan mengakui memang bukan pelacur maka keputusan diambil sekurang-kurangnya 3 hari.

Pada pasal 5 – 7 diberikan penjelasan mengenai kewajiban apa saja yang dibebankan kepada para mucikari dan polisi yang menjadi pengawas. Namun pasal-pasal tersebut tidak begitu saja sanggup menghapuskan prostitusi sepenuhnya. Adanya prostitusi yang terselubung justru membuat peraturan ini menjadi kurang efektif. Namun yang menjadikan kurang efektifnya UU tersebut justru tidak hanya datang dari Rumah Bordil atau mucikari saja, melainkan dari golongan orang-orang golongan atas masyarakat. Seperti halnya keberadaan para pejabat pemerintahan dan pemilik perkebunan yang kaya raya bisa memiliki lebih dari satu gundik. Selain itu masih adanya sistem istri simpanan dan pelacuran terselubung di antara para anggota militer yang masih lajang di barak-barak militer 6.

Beberapa data juga menyebutkan tentang jumlah perempuan asing dalam jumlah pria di Hindia Belanda. Kurangnya Wanita – Wanita Eropa di wilayah Hindia Belanda juga menjadi beberapa faktor penting bagi para anggota militer di wilayah Hindia Belanda, hal ini dapat dilihat dari tabel data di bawah ini.

Tabel 1
Jumlah Perempuan Asing setiap 1000 Pria di Hindia Belanda
1860-1930

No	Tahun	Eropa	Cina	Arab
1	1860	-	590	809
2	1880	481	620	830
3	1900	636	548	857
4	1905	672	526	890
5	1920	800	563	865
6	1930	884	646	841

Sumber: Djoko Utomo, 2001, *Pemberantasan Prostitusi Di Indonesia Masa Kolonial*, Jakarta; ANRI.

Jika dilihat dari data tabel yang disuguhkan oleh Djoko Utomo di atas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah Wanita Eropa di tahun 1870an tidak sebanyak jumlah wanita asing lainnya yang ada di wilayah Hindia Belanda. Jumlah Wanita Eropa mulai mengalami peningkatan ada di tahun 1900 – 1930, hal ini dimungkinkan bahwa pemerintah Hindia Belanda mulai memperhatikan kebutuhan akan perempuan Eropa di wilayah Hindia Belanda. Hal ini juga merupakan salah satu cara yang diambil oleh pemerintah Hindia Belanda dalam menekan prostitusi di wilayahnya.

Meskipun Wanita Eropa pada awalnya berjumlah sedikit namun bukan berarti hal tersebut sudah mampu menanggulangi masalah prostitusi. Munculnya prostitusi

terselubung di kalangan anggota militer Belanda ternyata tidak hanya didominasi oleh para wanita Pribumi saja sebagai PSK. Adanya golongan ras lain yang juga bekerja sebagai PSK sehingga hal ini semakin menguatkan bahwa dunia prostitusi di Hindia Belanda pada abad ke-19 merupakan lahan yang sangat menjanjikan. Munculnya catatan mengenai prostitusi Jepang dan Karayuki-San di Hindia Belanda yang dibuat oleh Muraoka Iheiji, seorang broker Jepang yang banyak membawa para wanita Jepang, untuk menjadi pelacur di beberapa daerah kawasan Asia Tenggara⁷. Membuktikan bahwa Hindia Belanda merupakan wilayah yang menjanjikan dalam bisnis prostitusi.

Kenyataan tersebut lebih dikuatkan lagi dengan kenyataan bahwa sebagai broker, Muraoka dalam usahanya tersebut mampu membawa perempuan dalam jumlah 7–8 orang sedangkan di Banjarmasin ia mengaku membuka usaha potong rambut dengan usaha sampingan rumah bordil. Setelah 5 bulan ia meninggalkan Banjarmasin dan menuju Surabaya. Di Surabaya ia mencoba membuka usaha kedai kopi. Di kedai kopi tersebut ia menempatkan perempuan–perempuan yang dibawanya. Ia lebih memilih wilayah Surabaya untuk menjadi tempat pusat usahanya. Di Surabaya sendiri sudah terdapat rumah–rumah tinggal yang dihuni oleh Karayuki-San. Daerah tersebut terutama di wilayah sekitar Pelabuhan Tanjung Perak⁸.

Sehingga pada wilayah–wilayah pelabuhan inilah para serdadu dan pelaut mengunjungi rumah–rumah pelacuran⁹. Disini nampak bahwa para PSK asing juga melayani kebutuhan para serdadu militer, meskipun jumlah mereka tidak sebanyak pribumi. Para wanita Jepang ini sendiri dimasukkan ke dalam golongan wanita Cina. Dengan persentase jumlah mereka yang cukup banyak. Seperti yang diterangkan pada tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 2

Pelacur Jepang di beberapa kota di Indonesia

Kota	Jumlah Rumah Bordil	Pemilik	Karayuki-San
Medan	2	Okayo Umeda nanigashi	10 orang 10 orang
Pontianak	Tidak diketahui	-	10 orang dan 10 orang dalam rencana
Banjarmasin	Tidak ada	Takaragawa N (rencana)	8 orang (rencana)
Semarang	1	Yoshida N Shimatsu N	8 orang 10 orang rencana
Batavia	2	Osono dan Uchida N Tachikawa N	12 orang 12 (rencana)
Surabaya	Tidak ada ijin kedai kopi dan Ice shop	Uchida N Nampo N dan Ito N	3 Orang Masing – masing 4 orang
Makasar	4	Uchida N Doi N Araki N Fukumoto N	4 orang 5 orang 5 orang 4 orang

Ambon	Tidak ada	Egawa N (pemain acrobat) tahun 1887 tiba dengan 15 perempuan	Tidak ada keterangan apakah 15 perempuan tersebut juga pemain acrobat atau Karayuki-San
-------	-----------	--------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Sri Pangastoeti, "Dari Kyuushuu Ke Ran'in: Karayuki-San Dan Prostitusi Jepang di Indonesia 1885-1920". Yogyakarta, UGM, 2007, hlm. 81.

Pada prosesnya, pemberantasan prostitusi sendiri juga berlangsung di beberapa daerah di Jawa dan luar Pulau Jawa. Seperti halnya pemberantasan yang terjadi di Surakarta pada tanggal 13 September 1870. Pemberantasan di Surakarta didasari atas surat Residen Surakarta tanggal 13 September 1870 mengenai data-data jumlah anggota militer yang terjangkit sakit kelamin serta tindakan pemberantasan pelacuran, perdagangan perempuan yang berakibat pada meluasnya wabah penyakit kelamin di kalangan militer di Surakarta. Dalam surat yang dibuat tersebut, disebutkan bahwa ;

Residen Surakarta telah memeberikan konsep surat untuk penguasa-penguasa setempat di Surakarta, Klaten dan Boyolali mengenai pemberantasan pelacuran berupa prostitusi dan perdagangan wanita. Menurut Menteri Kolonial di beberapa daerah di Hindia Belanda, diadakan pemeriksaan terhadap prostitusi. Diberitahukan juga dalam waktu yang singkat di Rumah Sakit Militer, dalam waktu tiga hari sudah terdapat 40 orang yang dirawat. Jadi mereka ini adalah 1/10-nya orang yang sehat di asrama dimana mereka menderita Syphilis dan penyakit kelamin lainnya. Para wanita tunasusila dengan tidak malu – malu menjajakan dirinya ketika hari mulai gelap. Mereka adalah penyebab penderita penyakit menular 10.

Surat laporan dari Karesidenan Surakarta di atas ingin memberitahukan bahwa ada banyaknya pelacuran dan perdagangan wanita yang terjadi di Surakarta dan sekitarnya, memunculkan sebuah reaksi yang tidak hanya datang dari para pemimpin militer saja melain juga dari para penguasa daerah. Ini menjadi bukti bahwa prostitusi di daerah terlihat lebih terbuka ketimbang beberapa kasus prostitusi di barak-barak militer. Kerjasama antar pemimpin daerah dengan para pemimpin daerah lain membuktikan bahwa adanya hubungan kerjasama yang baik antara wilayah satu dengan lainnya. Kepala Karesidenan Surakarta juga membuat pernyataan bahwa perlunya penutupan prostitusi kepada Gubernur Jenderal di Batavia, sehingga para pejabat tingkat daerah juga mendukung upaya pemerintah Hindia Belanda untuk melakukan pemberantasan prostitusi.

Selain surat laporan keadaan wilayah Karesidenan Surakarta tentang pengaruh prostitusi dan penyakit kelamin di wilayahnya, banyak pula dari beberapa daerah lain di di luar Pulau Jawa yang mengalami keadaan seperti yang dikabarkan Karesidenan Surakarta. Sejak muncul dan disahkannya peraturan pemerintah kolonial mengenai pemberantasan prostitusi dan pengawasan rumah-rumah bordil, di beberapa daerah pun

juga mulai mengikuti jejak pemerintah kolonial. Beberapa diantaranya laporan dan pendataan mengenai jumlah hingga aktivitas para PSK dan rumah-rumah bordil di wilayah masing-masing. Begitu pula dengan jumlah anggota militer yang terserang penyakit kelamin serta jenis-jenis penyakit kelamin yang menjangkiti.

KESIMPULAN

Prostitusi bukanlah sebuah peristiwa maupun fenomena yang terjadi dalam waktu singkat dan hanya sefihak saja, hal ini dibuktikan dengan adanya data mengenai jumlah Wanita pkerja seks komersil dengan berbagai ras dan asal di wilayah Hindia Belanda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dunia prostitusi merupakan area ekonomi yang sangat menjanjikan dengan perjalanan yang sangat Panjang untuk membangun area ekonomi menjanjikan ini di tahun 1870 – 1920. Dengan adanya data arsip mengenai masuknya Wanita pekerja seks komersil dari wilayah di luar Hindia Belanda membuktikan kembali bahwa permintaan akan Wanita pekerja seks komersil cukup tinggi.

Tingginya permintaan dan besarnya area ekonomi yang terkait dengan prostitusi menyebabkan pemerintah Hindia Belanda cukup kuwalahan, hal ini disebabkan karena mulai banyaknya penyakit kelamin yang mewabah di kalangan militer Hindia Belanda. Kalangan militer merupakan sumber kekuatan bagi negara Hindia Belanda untuk mempertahankan eksistensinya di wilayah jajahan. Karena hal ini maka perlu bagi pemerintah Hindia Belanda melakukan pemberantasan prostitusi yang dianggap sebagai salah penyebab penyakit kelamin di kalangan militer Hindia Belanda.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Djoko Utomo, 2001, Pemberantasan Prostitusi Di Indonesia Masa Kolonial, Jakarta; ANRI.
- [2] Peter Boomgaard, 2004, Anak Jajahan Belanda, Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795 – 1880, Jakarta; Djembatan.
- [3] Sri Pangastoeti, 2007 “Dari Kyuushuu Ke Ran’in: Karayuki-San Dan Prostitusi Jepang di Indonesia 1885-1920”. Yogyakarta, UGM.
- [4] Terence H. Hull, 1999, Prostitution in Indonesia : Its History and Evolution. Jakarta; Pustaka Sinar Harapan.
ARSIP
- [5] Besluit Gubernur Jenderal 21 Januari 1874.
- [6] Surat dari Direktur Kehakiman 20 Agustus 1891.
- [7] Surat dari Residen Madiun tanggal 30 Desember 1890 No. 7683/7 kepada Direktur Pendidikan, Agama dan Kerajinan di Batavia.
- [8] Surat dari Residen Timor kepada Direktur Pendidikan, Agama dan Kerajinan tanggal 26 November 1890 No 1934.
- [9] Surat Kepala Residen Palembang. Tanggal 18 oktober 1907 mengenai peraturan taggal 7 Maret 1903.
- [10] Surat Residen Surakarta tanggal 13 September 1870
THESIS
- [11] Lucia Arter Lintang Gritantin, Strategi Pemberantasan Penyakit Kelamin di Kalangan Militer Hindia Belanda Tahun 1870 – 1920, Yogyakarta, UGM.